

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Teori Dramaturgi Erving Goffman

Istilah Dramaturgi kental dengan pengaruh drama teater atau pertunjukan fiksi diatas panggung dimana seorang aktor memainkan karakter manusia-manusia yang lain sehingga penonton dapat memperoleh gambaran kehidupan dari tokoh tersebut dan mampu mengikuti alur cerita dari drama yang disajikan.

Goffman memperkenalkan dramaturgi pertama kali dalam kajian sosial psikologis dan sosiologi melalui bukunya, *The Presentation of Self In Everyday Life*. Buku tersebut menerangkan bahwa segala macam perilaku interaksi yang dilakukan manusia dalam sebuah pertunjukan kehidupan sehari-hari seolah-olah adalah menampilkan diri mereka sendiri, hal tersebut sama dengan cara seorang aktor menampilkan karakter orang lain dalam sebuah pertunjukan drama. Cara yang sama ini berarti mengacu kepada kesamaan dalam segala hal baik itu sifat, perilaku, penampilan, dll, yang berarti dalam hal ini membuktikan bahwa ada pertunjukan yang ditampilkan. Pertunjukan yang terjadi di masyarakat untuk memberi kesan yang baik untuk mencapai tujuan. Tujuan dari presentasi Erving Goffman ini adalah penerimaan penonton akan manipulasi. Dramaturgi mempelajari konteks dari perilaku manusia dalam mencapai tujuannya dan bukan untuk mempelajari hasil dari perilakunya tersebut.

Erving Goffman dalam bukunya yang berjudul *The Presentational of Self in Everyday Life* memperkenalkan konsep dramaturgi yang bersifat penampilan

teateris. Sebenarnya sebelum menguraikan teori dramaturgi, perlu kita uraikan terlebih dahulu sekilas tentang inti dari teori interaksi simbolik, karena teori interaksi simbolik banyak mengilhami teori dramaturgi Erving Goffman. Peletak dasar teori interaksi simbolik adalah George Herbert Mead pada tahun 1920-1930 yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Herbert Blumer tahun 1937.¹ Esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yaitu komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna, karena pada dasarnya interaksi manusia itu menggunakan simbol-simbol, cara mereka menggunakan simbol tersebut merepresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya.²

Salah satu kontribusi interaksionisme simbolik adalah penjabaran berbagai macam pengaruh yang ditimbulkan penafsiran orang lain terhadap identitas atau citra diri individu yang merupakan objek interpretasi. Jadi seperti halnya pemikiran kaum interaksionis pada umumnya. Inti pemikiran Goffman adalah “diri” (*self*), yang dijelaskan bahwa sebenarnya diri kita dihadapkan pada tuntutan untuk tidak ragu-ragu dalam melakukan apa yang diharapkan diri kita untuk memelihara citra diri yang stabil, orang selalu melakukan pertunjukan (*performance*) dihadapan khalayak.³ Sebagai hasil dari minatnya pada “pertunjukan” itu, Goffman memusatkan perhatian pada dramaturgi sebagai

¹ Basrowi Sudikin, *Metode penelitian kualitatif perspektif mikro* (Surabaya: Insan Cendekia, 2002), hal 103.

² Musta'in, “*teori diri*” *sebuah tafsir makna simbolik pendekatan teori dramaturgi Erving Goffman*, dalam jurnal *komunika*, vol 4 no 2 Juli-Desember 2010, hal 272

³ Deddy Mulyana, *Metode penelitian kualitatif paradigm baru ilmu komunikasi dan ilmu social lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hal 106

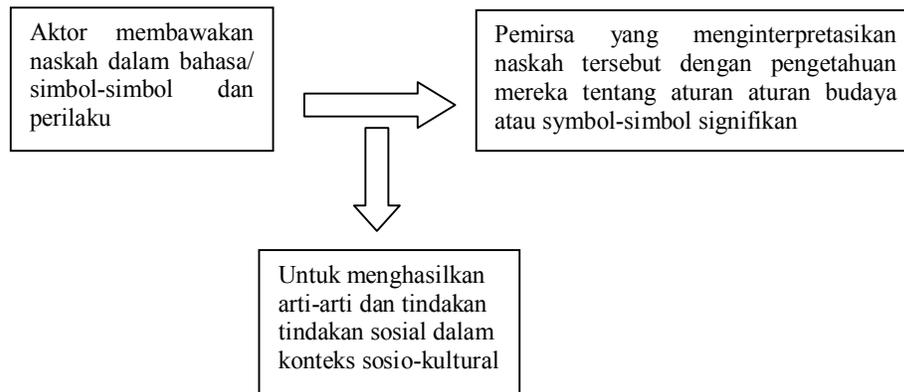
serangkaian pertunjukan drama yang mirip dengan pertunjukan drama di panggung.

Fokus pendekatan dramaturgi adalah bukan pada apa yang orang lakukan, bukan pada apa yang ingin mereka lakukan atau pada mengapa mereka melakukan, akan tetapi pada bagaimana mereka melakukannya. Burke melihat bahwa tindakan merupakan sebuah konsep dasar dalam dramaturgi. Dalam hal ini Burke memberikan pengertian yang berbeda antara aksi dan gerakan. Aksi terdiri dari tingkah laku yang disengaja dan mempunyai maksud, sedangkan gerakan adalah perilaku yang mengandung makna dan tidak bertujuan.⁴

Dramaturgi juga menekankan dimensi ekspresif/ impresif aktivitas manusia, yaitu bahwa makna kegiatan manusia terdapat dalam cara mereka mengekspresikan diri dalam interaksi dengan orang lain yang juga ekspresif. Oleh karena perilaku manusia bersifat ekspresif inilah maka perilaku manusia bersifat dramatik. Pendekatan dramaturgi berintikan bahwa ketika manusia berinteraksi dengan sesamanya, ia ingin mengelola pesan yang ia harapkan tumbuh dan dimengerti orang lain. Untuk itu setiap manusia melakukan pertunjukan bagi orang lain. Kaum dramaturgi memandang manusia sebagai aktor-aktor di atas panggung yang sedang memainkan peran-peran mereka. Burce Gronbeck memberikan sketsa tentang ide dasar dramaturgi seperti berikut:⁵

⁴ Musta'in, "*teori diri...*", hal 278

⁵ Ibid, 274



Dramaturgi memahami bahwa dalam interaksi antar manusia ada “kesepakatan” perilaku yang disetujui yang dapat mengantarkan kepada tujuan akhir dari maksud interaksi sosial tersebut. Bukti nyata bahwa terjadi permainan peran dalam kehidupan manusia dapat dilihat pada masyarakat kita sendiri. Manusia menciptakan sebuah mekanisme tersendiri, dimana dengan permainan peran tersebut ia bisa tampil sebagai sosok-sosok tertentu. Hal ini sama seperti yang terlihat pada kasus kekuasaan politik, dimana penguasa-penguasa yang melakukan penyimpangan ini, mereka menjalankan perannya di lingkungan mereka. Mereka berusaha mengontrol diri seperti penampilan, keadaan fisik, perilaku aktual dan gerak saat berkuasa, agar kekuasaan yang dia miliki seolah-olah terbungkus bagus dimata lingkungan mereka. Karena mereka tahu bahwa jika menjadi seorang penguasa politik namun berperilaku buruk serta dikendalikan adalah aib bagi dirinya.

Teori dramaturgi menjelaskan bahwa identitas manusia adalah tidak stabil dan setiap identitas tersebut merupakan bagian kejiwaan psikologi yang mandiri. Identitas manusia bisa saja berubah-ubah tergantung interaksi dengan orang lain.

Disinilah dramaturgis masuk, bagaimana kita menguasai interaksi tersebut. Dalam dramaturgis, interaksi sosial dimaknai sama dengan pertunjukan teater. Manusia adalah aktor yang berusaha untuk menggabungkan karakteristik personal dan tujuan kepada orang lain melalui pertunjukan dramanya sendiri.

Dengan konsep dramaturgis dan permainan peran yang dilakukan oleh manusia, terciptalah suasana-suasana dan kondisi interaksi yang kemudian memberikan makna tersendiri. Munculnya pemaknaan ini sangat tergantung pada latar belakang sosial masyarakat itu sendiri. Dramaturgis dianggap masuk ke dalam perspektif obyektif karena teori ini cenderung melihat manusia sebagai makhluk pasif (berserah). Meskipun, pada awal ingin memasuki peran tertentu manusia memiliki kemampuan untuk menjadi subyektif (kemampuan untuk memilih) namun pada saat menjalankan peran tersebut manusia berlaku objektif, berlaku natural, mengikuti alur. Misalnya yang ia ambil adalah pasrah menjadi penguasa yang dikendalikan karena ia takut kalau ia keluar dari dunia tersebut konsekuensinya akan lebih parah, atau ia tetap menggantungkan diri di dunia tersebut dan mengkhawatirkan kehidupan dirinya bila ia keluar. Maka setelah itu ia akan menjalani perannya sebagai korban. Secara naluriah ia akan menutup jati dirinya, atau ia berusaha menutupi telinganya untuk melindungi mental dan psikologisnya terhadap cemoahan orang disekeliling yang mengetahui hal tersebut. Itulah mengapa dramaturgi disebut memiliki muatan objektif. Karena pelakunya, menjalankan perannya secara natural, alamiah mengetahui langkah-langkah yang harus dijalani. Seperti telah dijabarkan diatas.

Dramaturgis merupakan teori yang mempelajari proses dari perilaku dan bukan hasil dari perilaku. Obyektivitas yang digunakan disini adalah karena institusi tempat dramaturgi berperan adalah memang institusi yang terukur dan membutuhkan peran-peran yang sesuai dengan semangat institusi tersebut.

a. “Diri” menurut Goffman: Pesentasi diri

Dalam bukunya *The presentation of self in everyday life* Goffman menerangkan bahwa fokus dramaturgi bukan konsep diri yang dibawa oleh aktor dari situasi ke situasi lainnya atau keseluruhan jumlah pengalaman individu, melainkan diri yang tersituasikan secara sosial yang berkembang dan mengatur interaksi-interaksi spesifik. Menurut Goffman, diri adalah suatu hasil kerjasama yang harus diproduksi sehingga menjadi baru dalam setiap peristiwa interaksi sosial.⁶

Presentasi diri seperti yang ditunjukkan Goffman ini bertujuan untuk memproduksi definisi situasi dan identitas sosial bagi para aktor, dan definisi situasi tersebut mempengaruhi ragam interaksi yang layak dan tidak layak bagi para aktor dalam situasi yang ada. Goffman mengasumsikan bahwa ketika orang-orang berinteraksi, mereka ingin menyajikan suatu gambaran diri yang akan diterima orang lain. Ia menyebut upaya itu sebagai “pengelolaan pesan” yaitu teknik-teknik yang digunakan para aktor untuk memupuk kesan-kesan tertentu dalam situasi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

⁶ Deddy Mulyana, *Metode penelitian...*, hal 110-111.

b. Panggung depan dan Panggung Belakang

Dalam perspektif dramaturgi, kehidupan ini ibarat teater, interaksi sosial yang mirip dengan pertunjukan diatas panggung, yang menampilkan peran-peran yang dimainkan para aktor. Untuk memainkan peran tersebut biasa para aktor menggunakan bahasa verbal dan menggunakan perilaku non verbal tertentu serta menggunakan atribut-atribut tertentu, misalnya kendaraan, pakaian, dan aksesoris lainnya yang sesuai dengan perannya dalam situasi tertentu. Seorang aktor harus memusatkan pikiran agar tidak keseleo-lidah, menjaga kendali diri, melakukan gerak gerik, menjaga nada suara dan mengekspresikan wajah yang sesuai dengan situasi.

Menurut Goffman kehidupan social itu dapat dibagi menjadi wilayah depan (*Front region*) dan wilayah belakang (*back region*). Wilayah depan merujuk pada peristiwa sosial yang menunjukkan bahwa individu bergaya atau menampilkan peran formalnya. Mereka sedang memainkan perannya diatas panggung sandiwara di hadapan khalayak umum. Sebaliknya wilayah belakang merujuk kepada tempat atau peristiwa yang memungkinkan mempersiapkan perannya di wilayah depan. Wilayah depan ibarat panggung sandiwara bagian depan yang ditonton khalayak penonton, sedangkan wilayah belakang ibarat panggung sandiwara bagian belakang tempat rias, tempat santai, mempersiapkan diri dan berlatih memainkan perannya di panggung depan.

Goffman membagi panggung depan menjadi 2 bagian yaitu Front pribadi (*personal Front*) dan setting. *Front* pribadi terdiri dari alat-alat yang dianggap khalayak sebagai perlengkapan yang dibawa aktor ke dalam *setting* misalnya

seorang kepala desa diharapkan memakai pakaian selayaknya pemimpin berdas, berkopyah, memakai jas, dll. *Personal Front* mencakup bahasa verbal dan bahasa tubuh sang aktor. Misalnya berpakaian sopan, mengucapkan istilah-istilah asing, intonasi, postur tubuh, ekspresi wajah, pakaian, penampakan usia, dll. Sementara itu *setting* adalah situasi fisik yang harus ada ketika aktor melakukan pertunjukan, misalnya seorang dokter memerlukan ruang operasi, seorang sopir memerlukan kendaraan, seorang kepala desa memerlukan kantor desa, dll.

Goffman berpendapat bahwa pada umumnya orang-orang berusaha menyajikan diri mereka yang diidealisasikan dalam sebuah pertunjukan mereka di panggung depan, karena mereka selalu merasa harus menyembunyikan hal-hal tertentu dalam pertunjukannya. Hal tersebut disebabkan oleh:⁷ *Pertama*, aktor mungkin ingin menyembunyikan kesenangan-kesenangan tersembunyi. *Kedua*, aktor mungkin ingin menyembunyikan kesalahan yang dibuat saat persiapan pertunjukan, dan melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki kesalahan tersebut. *Ketiga*, aktor mungkin merasa hanya perlu menunjukkan produk akhir dan menyembunyikan proses produksinya. *Keempat*, aktor mungkin perlu menyembunyikan “kerja kotor” yang dilakukan untuk membuat produk akhir dari khalayak. *Kelima*, dalam menampilkan pertunjukan tertentu aktor mungkin harus mengabaikan standart lain (misalnya menyembunyikan hinaan, pelecehan, atau perundingan yang dibuat sehingga pertunjukan dapat berlangsung).⁸

⁷ Ibid, hal 116

⁸ George Ritzer et, *Teori Sosiologi modern* (terj) (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal 298-299.

Aspek lain dari dramaturgi di panggung depan adalah bahwa aktor sering berusaha menyampaikan kesan bahwa mereka punya hubungan khusus atau jarak sosial lebih dekat dengan khalayak daripada jarak sosial yang sebenarnya. Goffman mengakui bahwa orang tidak selamanya ingin menunukkan peran formalnya dalam panggung depan karena kadangkala orang juga memainkan perasaan, meskipun ia merasa enggan akan peran tersebut, atau menunjukkan keengganan untuk memainkan peran tersebut. Akan tetapi menurut Goffman ketika orang melakukan hal tersebut mereka tidak bermaksud membebaskan diri dari peran social atau identitas formal tersebut, akan tetapi karena ada perasaan sosial dan identitas lain yang menguntungkan mereka.

c. Penggunaan tim dalam Dramaturgi

Fokus perhatian Goffman sebenarnya bukan hanya individu, tetapi juga kelompok atau apa yang disebut tim. Selain membawakan peran dan karakter secara individu, aktor-aktor sosial juga berusaha mengelola kesan orang lain terhadap kelompoknya, baik itu keluarga, tempat kerja, patai politik, atau organisasi lain yang mewakili. Semua anggota itu oleh Goffman disebut “tim pertunjukan” (*performance team*) yang mendramatisasikan suatu aktivitas. Kerjasama tim sering dilakukan para anggota untuk menciptakan dan menjaga penampilan dalam wilayah depan. Mereka harus mempersiapkan perlengkapan pertunjukan dengan matang dan jalannya pertunjukan, memilih pemain inti yang layak, melakukan pertunjukan secermat dan seefisien mungkin, dan kalau perlu juga memilih khalayak yang sesuai. Setiap anggota saling mendukung dan bila

perlu memberi arahan lewat isyarat nonverbal, seperti isyarat dengan tangan atau isyarat mata agar pertunjukan berjalan mulus.

Goffman menekankan bahwa pertunjukan yang dibawakan suatu tim sangat bergantung pada kesetiaan setiap anggotanya. Setiap anggota tim memegang rahasia tersembunyi bagi khalayak yang memungkinkan kewibawaan tim tetap terjaga. Dalam kerangka yang lebih luas, sebenarnya khalayak juga dapat dianggap sebagai bagian dari tim pertunjukan. Artinya agar pertunjukan sukses, khalayak juga harus berpartisipasi untuk menjaga agar pertunjukan berjalan dengan lancar.

B. Konsep dan Teori Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan suatu proses dengan berbagai cara mempengaruhi orang atau kelompok orang untuk mencapai suatu tujuan bersama. Pembahasan tentang kepemimpinan dalam penelitian ini akan menyangkut tugas dan fungsi kepemimpinan yang ideal serta analisa kepemimpinan berdasarkan ciri-ciri pemimpin yang efektif. Selain itu juga diperkuat dengan analisa dari salah satu teori yang menjelaskan kemunculan pemimpin jika diaplikasikan pada kepemimpinan dan menjelaskan pengambilan keputusan Evi sebagai kepala desa dari sudut pandang teori kepemimpinan Vroom and Yetton.

1. Tugas kepemimpinan

Tugas kepemimpinan (*leadership function*), meliputi dua bidang utama yaitu pekerjaan yang harus diselesaikan dan kekompakan orang-orang yang dipimpinya. Tugas yang berhubungan dengan pekerjaan disebut *task function*. Tugas yang berhubungan dengan kekompakan disebut *relationship function*.

Tugas yang berhubungan dengan pekerjaan perlu agar pekerjaan kelompok dapat diselesaikan dan kelompok mencapai tujuannya. Tugas yang berhubungan dengan kekompakan dibutuhkan agar hubungan antar orang yang bekerjasama menyelesaikan kerja itu lancar dan enak jalannya.⁹

Tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan kerja kelompok antara lain:

- a. Memulai (*initiating*) adalah suatu usaha agar suatu kelompok memulai suatu kegiatan atau gerakan tertentu. Misalnya mengajukan masalah kepada kelompok dan mengajak para anggota mulai berfikir memikirkan dan mencari jalan pemecahannya.
- b. Mengatur (*regulating*) adalah tindakan untuk mengatur arah dan langkah kegiatan kelompok.
- c. Memberitahu (*information*) adalah kegiatan member informasi, data, fakta, pendapat kepada para anggota dan minta dari mereka informasi, data, fakta dan pendapat yang diperlukan.
- d. Mendukung (*isupporting*) adalah usaha untuk menerima gagasan, pendapat, usul dari bawah dan menyempurnakannya dengan menambah dan menguranginya untuk digunakan dalam rangka menyelesaikan tugas bersama.
- e. Menilai (*evaluating*) adalah tindakan untuk menguji gagasan yang muncul atau cara kerja yang diambil dengan menunjukkan konsekuensi-konsekuensi dan untung-ruginya.

⁹ Charles J Keating, *Kepemimpinan: teori dan pengembangannya* (Yogyakarta: KANISIUS, 1986), ed. Mangunhardjana, hal 9.

- f. Menyimpulkan (*summarizing*) adalah kegiatan untuk mengumpulkan dan merumuskan gagasan, pendapat dan usul yang muncul, menyingkat lalu menyimpulkannya sebagai landasan untuk pemikiran lebih lanjut.

Tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan kekompakan kelompok antara lain:

- a) Mendorong (*encouraging*) adalah bersikap hangat, bersahabat, dan menerima semua kalangan.
- b) Mengungkapkan perasaan (*expressing feeling*) adalah tindakan menyatakan perasaan terhadap kerja dan kekompakan kelompok seperti rasa haus, rasa bangga, dan ikut seperasaan dengan orang-orang yang menjadi bawahannya pada waktu mengalami kesulitan, kegagalan, dll.
- c) Mendamaikan (*harmonizing*) adalah tindakan mempertemukan dan mendamaikan pendapat-pendapat yang berbeda dan merukunkan orang-orang yang bersitegang satu sama lain.
- d) Mengalah (*compromising*) adalah kemauan untuk mengubah dan menyesuaikan pendapat dan perasaan sendiri dengan pendapat dan perasaan orang-orang yang dipimpinnya.
- e) Memperlancar (*gatekeeping*) adalah kesediaan membantu mempermudah keikutsertaan para anggota atau bawahannya dalam kelompok, sehingga semua rela menyumbangkan dan mengungkapkan gagasan-gagasan.
- f) Memasag aturan permainan (*setting standards*) adalah tindakan menyampaikan aturan dan tata tertib yang membantu kehidupan bawahannya.

Untuk dapat menjadi seorang pemimpin tidaklah muda karena yang terpenting adalah kemampuan yang ada dalam dirinya yang harus ditunjang latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang yang akan dipegangnya. Sehingga untuk menjadi seorang pemimpin yang berhasil terdapat beberapa nilai dasar kepemimpinan, menurut Tilaar dalam tan sebagai berikut:¹⁰

1. Intelegensia yang relative lebih tinggi daripada yang dipimpin
2. Berfikir positif
3. Kedewasaan sosial dan cakupan jangkauan yang luas
4. Menjadi panutan yang baik
5. Menjadi pendengar yang baik
6. Keterbukaan dalam berkomunikasi
7. Tidak mudah menyerah

Nilai dasar kepemimpinan tersebut merupakan arah yang harus dijalankan pemimpin dalam menjalankan pemerintahan yang dipimpinnya sesuai dengan tujuan yang harus dicapai. Apabila seorang pemimpin telah menjalankan nilai dasar kepemimpinan maka antara pemimpin termuda maupun pemimpin senior tidak ada bedanya. Sehingga sehingga proses pemerintahan atau institusi yang dipimpinnya akan berjalan sesuai tujuan dengan meminimalkan resiko yang mungkin muncul.

¹⁰ Marta tilaar, *citra wanita Indonesia tahun 2000: kemandirian dalam menjawab tantangan pembangunan*. Dalam tan Melly G Peremuan Indonesia memimpin massa depan? Jakarta: pustaka sinar harapan, hal 71-72

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan

Dalam melaksanakan tugas kepemimpinan mempengaruhi orang atau sekelompok orang menuju ke tujuan tertentu pemimpin dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor itu berasal dari diri kita sendiri, pandangan kita terhadap manusia, keadaan kelompok dan situasi waktu kepemimpinan kita laksanakan.

Faktor-faktor yang berasal dari diri sendiri, yang mempengaruhi kepemimpinan kita adalah pengertian kita tentang kepemimpinan, nilai atau hal yang kita kejar dalam kepemimpinan, cara kita berhasil menduduki pangkat kepemimpinan dan pengalaman yang telah kita miliki di bidang kepemimpinan. Pengertian seseorang tentang kepemimpinan mempengaruhi kepemimpinannya. Orang yang memandang kepemimpinan sebagai status dan hak untuk mendapatkan fasilitas, uang, barang, keenangan hidup, jelas akan menunjukkan praktek kepemimpinan yang tidak sama dengan orang yang mengartikan kepemimpinan sebagai pelayanan bagi kesejahteraan orang-orang yang dipimpinnya dan memandang fasilitas kepemimpinan sebagai hal agar dapat melayani lebih baik. Nilai atau hal yang dikejar dalam kepemimpinan membawa akibat pada kepemimpinannya.

Seorang pemimpin yang menganggap prestasi kelompok orang yang dipimpin merupakan nilai atau hal yang harus dikejar akan menunjukkan kepemimpinan yang berbeda dari pemimpin lain yang menghargai kerukunan orang-orangnya. Cara orang berhasil menduduki pangkat kepemimpinan mempengaruhi kepemimpinannya. Orang yang menjadi pemimpin melulu hanya karena diangkat dan bukan karena kecakapan yang dimiliki akan menunjukkan

perilaku kepemimpinan yang berbeda dari orang yang menjadi pemimpin karena kecakapan yang jelas sudah terbukti. Pengalaman orang dalam kepemimpinan juga mempengaruhi kepemimpinan. Seorang pemimpin yang sudah biasa bergaya kerja tinggi kekompakan rendah misalnya, cenderung akan mempergunakan gaya kepemimpinan itu tanpa memperhitungkan orang-orang yang dipimpin atau situasi kepemimpinan yang ada.

Keadaan kelompok orang yang kita pimpin juga mempengaruhi kepemimpinan kita. Kelompok yang matang cenderung membuat kita rela menyerahkan kepercayaan dan kekuasaan kepada para anggota. Kelompok yang belum matang membuat kita cenderung bertindak otoriter dengan banyak menyuruh dan terlalu direktif.

Situasi kepemimpinan amat ditentukan oleh penyelesaian tugas bersama dan keompakan kelompok. Situasi, yang menuntut agar tugas segera diselesaikan, cenderung membuat pemimpin lebih menekankan orientasi pada pekerjaan dan kurang pada orang-orang yang dipimpinnya. Situasi kelompok yang tidak kompak membuat kita cenderung untuk lebih memperhatikan hubungan antar mereka dan kurang untuk menghimpun usaha untuk menyelesaikan tugas bersama.

Oleh karena itu, sebagai pemimpin kita perlu mengerti diri sendiri, terutama yang berhubungan dengan peranan kita sebagai pemimpin; orang-orang yang kita pimpin; masing-masing dan sebagai kelompok; dan situasi di mana kepemimpinan kita berlangsung. Berdasarkan pengertian itu kita perlu mengambil

gaya dan cara memimpin yang paling membawa hasil dan manfaat bagi lembaga organisasi dan orang-orang yang kita pimpin.¹¹

3. Fungsi-fungsi kepemimpinan yang efektif

Ada beberapa fungsi-fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif hanya akan terwujud apabila dijalankan sesuai dengan fungsinya. Fungsi kepemimpinan itu berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok atau organisasi masing-masing, yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan bukan di luar situasi itu. Fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam intraksi antar individu di dalam situasi sosial suatu kelompok atau organisasi karena fungsi kepemimpinan sangat mempengaruhi maju mundurnya suatu organisasi, tanpa ada penjabaran yang jelas tentang fungsi pemimpin mustahil pembagian kerja dalam organisasi dapat dapat berjalan dengan baik.

Sondang P. Siagian dalam bukunya *Teori dan Praktek Kepemimpinan* mengatakan beberapa fungsi kepemimpinan sebagai berikut:¹²

1. Pimpinan sebagai penentu arah dalam usaha pencapaian tujuan
2. Pemimpin sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan pihak-pihak di luar organisasi
3. Pemimpin sebagai komunikator yang efektif
4. Pemimpin sebagai mediator, khususnya dalam hubungan ke dalam, terutama dalam menangani situasi konflik

¹¹ Charles J. Keating, *Kepemimpinan dan Teori Perkembangannya*, Terj. A.M Mangundiharjo (Yogyakarta: Kanisius, 1997), 18-20.

¹² Sondang Siagian, *Teori dan Praktek Kepemimpinan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hal 48-70.

5. Pemimpin sebagai integrator yang efektif, rasional, objektif dan netral

Fungsi kepemimpinan menurut Rivai, bahwa kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok/ organisasi masing-masing yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan bukan di luar situasi itu. Fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu di dalam situasi sosial suatu kelompok/ organisasi.¹³

Fungsi kepemimpinan sendiri dikelompokkan dalam dua dimensi berikut:¹⁴

1. Dimensi yang berkenaan dengan tingkat kemampuan mengarahkan (*direction*) dalam tindakan atau aktivitas pemimpin.
2. Dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan (*support*) atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas pokok kelompok/organisasi.

Sedangkan menurut Hamdani Nawawi dalam bukunya Kepemimpinan yang Efektif menyebutkan ada lima fungsi kepemimpinan. Kelima fungsi kepemimpinan itu adalah:¹⁵

- Fungsi *instruktif*

Fungsi ini berlangsung dan bersifat komunikasi satu arah, pemimpin sebagai pengambil keputusan berfungsi memerintahkan pelaksanaannya pada orang-orang yang dipimpin. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak

¹³ Etrizal Rivai. 2002. *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

¹⁴ Ibid, hal

¹⁵ Nawawi Hadari, *Kepemimpinan yang Efektif*, (Yogyakarta: UGM University, 2000)

yang menentukan apa (isi perintah), bagaimana (cara mengerjakan perintah), bilamana (waktu memulai, melaksanakan dan melaporkan hasilnya), dan dimana (tempat mengerjakan perintah) agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah. *Inisiatif* tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan perintah itu, sepenuhnya merupakan fungsi pemimpin.

- Fungsi *konsultatif*

Fungsi ini berlangsung dan bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama dalam usaha menetapkan keputusan, fungsi pemimpin sebagai konsultan untuk mendengarkan pendapat, saran serta pertanyaan dari bawahannya, mengenai keputusan yang akan diambil oleh pemimpin.

- Fungsi partisipasi

Dalam fungsi ini pemimpin menjalankan serta mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Setiap anggota kelompoknya memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok, sesuai dengan posisi atau jabatan masing-masing. Pemimpin juga tidak hanya ikut dalam proses pembuatan keputusan dalam fungsi ini pemimpin ikut serta dalam proses pelaksanaannya.

Fungsi partisipasi ini bukan berarti pemimpin memberikan kebebasan semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerja sama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain.

- Fungsi delegasi

Fungsi ini pemimpin sebagai pemegang wewenang tertinggi harus bersedia dan dapat mempercayai orang-orang lain, sesuai dengan posisi atau jabatannya, apabila diberi atau mendapat pelimpahan wewenang.

- Fungsi pengendalian

Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses dan efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Sehubungan dengan itu bahwa fungsi pengendalian dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi dan pengawasan.

Dengan bimbingan dan pengarahan, koordinasi dan pengawasan, pemimpin berusaha mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan setiap unit atau perseorangan dalam melaksanakan volume dan beban kerjanya atau perintah dari pimpinannya. Pengendalian dilakukan dengan cara mencegah anggota berfikir dan berbuat sesuatu yang cenderung merugikan kepentingan bersama.

4. Kepemimpinan yang ideal

Dalam ilmu politik diuraikan tentang sifat-sifat ideal seorang pemimpin, Herman Finner mengungkapkan sebagai berikut:¹⁶

Kesadaran, berarti bahwa seseorang pemimpin harus dapat menguasai fakta-fakta yaitu pengetahuan yang dibutuhkan agar mampu menjalankan jabatannya. *Kebulatan pandangan*, adalah bersifat esensial bahwa seorang

¹⁶ Kamal Muasik, *Budaya Politik Kampus; Studi Terhadap Aktivis Mahasiswa Dilingkungan Universitas Negeri Semarang* (Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2005), hal 34

pemimpin harus mampu menghubungkan berbagai cabang pengetahuan yang terpenting bagi kedudukannya. *Ketetapan jiwa*, dari seorang pemimpin kita mengharapkan adanya ketetapan jiwa emosi, kelakuan, sikap dimana dia akan selalu menguasai setiap persoalan bila dibutuhkan, dan dia akan selalu mampu menggunakan fikirannya secara tepat dalam setiap permasalahan yang muncul.

Keyakinan, artinya seorang pemimpin mempunyai ide-ide, imajinasi, kebijakan-kebijakan, prinsip-prinsip, mempunyai pola pandangan yang positif, dan konstruktif tentang masyarakat yang baik didalam daya cipta yang diperjuangkan dengan gigih dan berketetapan. *Kearifan*, artinya kemampuan dari seseorang pemimpin untuk menemukan hal-hal yang baru dan menerapkan kebijaksanaannya dalam situasi tertentu, menciptakan segala keyakinannya dalam kenyataan, memikirkan hal kedepan. Karena itu pengetahuan, ketetapan, kebulatan pandangan, keyakinan akan diterapkan terhadap berbagai situasi yang belum pernah terjadi, tetapi telah diduga sebelumnya.

Kepekaan hati nurani artinya seseorang pemimpin terpenggil oleh hati nurani oleh rasa tanggung jawabnya atas segala kualitas yang telah terurai di atas dan bahkan hal-hal lainnya yang harus diperinci lebih lanjut. *Keberanian*, artinya dia mungkin mempunyai musuh-musuh dan penderitaan oleh segala bentuk ketidak beruntungannya. Tetapi seorang pemimpin harus menanggung resiko dan tidak menyerah pada perasaan atau kepentingan subjektifnya.

Kemampuan memukau, kualitas yang dinamakan: daya pikat atau kekuatan menawan hati rakyat melalui gaya pidato, pemunculan yang tepat, dan anjuran tindakan untuk melakukan sesuatu. *Kepandaian*, kepemimpinan adalah kegiatan

mempengaruhi orang banyak untuk bekerja sama guna suatu tujuan yang dijadikan keinginan mereka.

5. Teori asal mula kemunculan kepemimpinan

Sejarah lahirnya pemimpin tidak lepas dari fungsi akan kepemimpinan. Ia muncul bersama peradaban manusia sejak zaman kemunculan manusia, yang mana pada saat itu dibutuhkan kerjasama antar manusia dalam menjamin kelangsungan hidupnya. Kepemimpinan diperlukan untuk menjaga kesatuan para anggotanya dalam mengatur maupun menghadapi pengaruh dari luar maupun di dalam suatu kelompok tertentu. Dengan ringkasnya, pemimpin dan kepemimpinan dimanapun dan kapanpun selalu diperlukan baik sekarang maupun masa yang akan datang.

Adapun dari berbagai teori yang membahas tentang kepemimpinan, ada tiga teori yang menonjol dalam menjelaskan asal mula kemunculan pemimpin, diantaranya :¹⁷

- a. Teori genetic (*genetic theory*) menyatakan bahwa pemimpin itu tidak dibuat akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat bakat alamiah luar biasa sejak lahir. Seorang pemimpin memang ditakdirkan menjadi pemimpin dalam situasi dan kondisi bagaimanapun juga. Jadi menurut teori ini, pemimpin itu lahir karena mewarisi bakat yang diturunkan orang tua atau leluhur. Secara filosofi teori tersebut menganut pandangan *deterministis*.

¹⁷ Kartini Hartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hal 29., idem liat juga di Sedarmayanti, *Reformasi administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Massa Depan* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal 126.

- b. Teori social (*traits theory*) menyatakan bahwa pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan dibentuk tidak lahir begitu saja. Setiap orang bisa menjadi pemimpin melalui usaha penyiapan dan pendidikan serta didorong oleh kemauan sendiri. Munculnya pemimpin-pemimpin merupakan hasil dari waktu, tempat dan keadaan tertentu. Seseorang akan muncul menjadi pemimpin apabila ia berada dalam lingkungan sosial, dan mampu memanfaatkan situasi dan kondisi sosial untuk bertindak mengatasi masalah sosial. Setiap situasi dan kondisi akan menuntut kualitas kepemimpinan yang berbeda pula. Teori ini sejalan dengan pandangan bahwa "*leaders are made not born*". Jadi menurut teori ini pemimpin bukan diwariskan tetapi diciptakan dan dibentuk.¹⁸
- c. Teori Ekologis (*behavioral theory*) menyatakan bahwa seseorang akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahirnya dia memiliki bakat nbakat kepemimpinan dan bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan dan sesuai tuntutan ekologisnya. Jadi menurut teori ini pemimpin itu diciptakan oleh lingkungan.

6. Teori Kepemimpinan Vroom and Yetton

Teori kepemimpinan Vroom and Yetton ini merupakan salah satu teori *contingency*. Teori ini dikembangkan oleh Vroom and Yetton dan disebut juga sebagai model normatif tentang kepemimpinan, karena mengarah kepada pemberian suatu rekomendasi tentang kepemimpinan yang sebaiknya digunakan dalam situasi tertentu, yang berfokus pada tingkat partisipasi yang diperbolehkan

¹⁸ <http://avivsyuhada.wordpress.com/2012/02/23/teori-teori-kepemimpinan>

oleh pemimpin dalam pengambilan keputusan dan seleksi pendekatan yang akan memaksimalkan manfaat yang akan didapat kelompok dan pada waktu yang bersamaan, meminimalisasi gangguan pencapaian tujuan kelompok.

Model yang menjelaskan bagaimana seorang pemimpin harus memimpin dalam berbagai situasi. Model ini menunjukkan bahwa tidak ada corak kepemimpinan tunggal yang dapat diterapkan pada semua situasi. Pada hakikatnya, model ini dapat digunakan sebagai alat untuk:

- a. Membantu mengenali berbagai jenis situasi pemecahan persoalan secara berkelompok (*group problem-solving situations*)
- b. Menyarankan gaya-gaya kepemimpinan mana yang dianggap layak untuk setiap situasi. Ada tiga parameter yang penting yaitu: (1) klasifikasi gaya kepemimpinan; (2) kriteria efektivitas keputusan; (3) kriteria penemukenalan jenis situasi pemecahan persoalan.

Lima pola umum Gaya Kepemimpinan dalam Pengambilan Keputusan:

- 1) *Autocratic I*: membuat keputusan dengan menggunakan informasi yang saat ini terdapat pada pemimpin. Artinya adalah menetapkan keputusan sendiri dengan menggunakan informasi yang ada saat sehingga partisipasi bawahan tidak ada sama sekali karena pemimpin mengambil sendiri keputusan berdasarkan informasi yang ada padanya saat itu.
- 2) *Autocratic II*: membuat keputusan dengan menggunakan informasi yang terdapat pada seluruh anggota kelompok tanpa terlebih dahulu menginformasikan tujuan dari penyampaian informasi yang mereka berikan. Dalam hal ini pemimpin mendapatkan informasi dari bawahan dan

menyeselesaikan masalah sendiri. Tidak perlu memberitahukan kepada bawahan apa yang menjadi masalah ketika meminta informasi kepada mereka, peran yang diharapkan dari bawahan hanya merupakan sumber informasi dan bukan mengemban alternative penyelesaian. Sehingga partisipasi bawahan sangat rendah karena pemimpin memperoleh informasi dari bawahannya dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang didapat. jadi peran bawahan hanya memberikan informasi, bukan memberikan alternatif.

- 3) *Consultative I*: berbagi akan masalah yang ada dengan individu yang relevan, mengetahui ide-ide dan saran mereka tanpa melibatkan mereka ke dalam kelompok; lalu membuat keputusan. Dalam hal ini pemimpin mengikut sertakan bawahan yang bersangkutan dengan masalah, minta ide dan sarannya secara sendiri-sendiri. Kemudian mengambil keputusan, baik sendiri atau tidak disertai pengaruh dan saran-saran bawahan. Sehingga partisipasi bawahan sedang karena pemimpin memberitahukan masalah yang sedang terjadi kepada bawahan secara pribadi, lalu kemudian memperoleh informasi tanpa mengumpulkan semua bawahannya secara kelompok, setelah itu mengambil keputusan dengan mempertimbangkan/tidak gagasan dari bawahannya.
- 4) *Consultative II*: berbagi masalah dengan kelompok, mendapatkan ide-ide dan saran mereka saat diskusi kelompok berlangsung, dan kemudian membuat keputusan. Dalam hal ini pemimpin mengikut sertakan bawahan sebagai satu kelompok, dapatkan ide dan saran dari mereka. Kemudian

ambil keputusan sendiri disertai pengaruh dan saran bawahan. Sehingga partisipasi bawahan tinggi karena pemimpin mengumpulkan semua bawahannya secara kelompok, lalu menanyakan gagasan mereka terhadap masalah yang sedang ada, dan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan/ tidak gagasan bawahannya

- 5) *Group II*: berbagi masalah yang ada dengan kelompok, mengepalai diskusi kelompok, serta menerima dan menerapkan keputusan apapun yang dibuat oleh kelompok. Dalam hal ini pemimpin mengikut sertakan bawahan sebagai suatu kelompok dalam memecahkan masalah. Bersama mereka kembangkan dan evaluasi alternatif. Usahakan mencapai consensus. Anda sebagai pemimpin berperan sebagai ketua. Tidak dibenarkan mempengaruhi kelompok dengan apa yang hendak anda putuskan dan anda bersedia untuk menerima dan melaksanakan setiap keputusan kelompok. Partisipasi bawahan sangat tinggi. Pemimpin memberitahukan masalah kepada bawahannya secara berkelompok, lalu bersama-sama merundingkan jalan keluarnya, dan mengambil keputusan yang disetujui oleh semua pihak.

Teori kepemimpinan Vroom & Yetton adalah jenis teori kontingensi yang menitikberatkan pada hal pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemimpin. Teori vroom dan yetton juga di sebut teori normative karena mengarah pada pemberian suatu rekomendasi tentang gaya kepemimpinan yang sebaiknya di gunakan dalam situasi tertentu.

7. Kepemimpinan dalam Pemerintahan Desa

Dilihat dari posisi desa yang dilematik; pada satu sisi membutuhkan otonomi untuk merealisasikan keaslian dan aspirasi lokal, dan disisi lain harus memperhatikan “pusat”, dapat dikatakan bahwa kekuasaan pemerintahan desa untuk mengatur wilayahnya sangat besar dan bersifat mutlak. Oleh sebab itu, kontrol menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa kepemimpinan tersebut tidak disalahgunakan dan tidak menjadikan alat bagi pemimpin untuk memperdayakan rakyat.

Suatu pemerintahan desa yang demokratis adalah pemerintahan yang lahir dari bentuk masyarakat sendiri, dan bukan merupakan hasil rekayasa elit penguasa. Pemerintahan desa mengakui ada tiga kuasa yang ada, yang menjadi kekuatan utama penggerak pemerintahan desa. Tiga kuasa yang dimaksud adalah:

- 1). Kedaulatan rakyat merupakan sumber utama dari kekuasaan yang ada. Pengakuan adanya kedaulatan rakyat merupakan cermin dari sebuah persepsi mengenai kekuasaan yang rasional, di mana kekuasaan datang dari rakyat dan karena itu harus dipertanggung jawabkan pada rakyat.
- 2). Parlemen desa adalah badan yang berfungsi dalam skema demokrasi perwakilan. Posisi parlemen desa sebagai penyampai aspirasi rakyat, dan tidak memiliki otonomi di hadapan rakyat. Parlemen desa juga bukan sebuah badan yang menerima kekuasaan mutlak dari rakyat desa, sebab yang diberikan hanya sebagian, sehingga ketika sewaktu - waktu dirasakan terjadi pengingkaran suara rakyat, maka rakyat bisa menggunakan hak dasarnya.

- 3). Pemerintahan desa adalah badan eksekutif yang bertugas menjalankan aspirasi rakyat, untuk menjawab problem dan harapan rakyat.¹⁹

8. Pelaksanaan kepemimpinan politik

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kekuasaan politik atau penggunaan sumber sumber terdapat empat faktor yang perlu dikaji. Keempat faktor itu meliputi bentuk dan jumlah sumber, distribusi sumber, kapan seorang atau kelompok menggunakan sumber sumber dan hasil penggunaan sumber sumber kekuasaan.

Yang termasuk dalam kategori bentuk dan sumber kekuasaan adalah sarana paksaan fisik, kekayaan harta benda, normative, jabatan, keahlian, informasi, status social, popularitas pribadi, massa yang terorganisasi. Senjata tradisional, senjata konvensional, senjata modern, penjara, kerja keras, teknologi, dan aparat yang menggunakan senjata-senjata ini merupakan contoh bentuk paksaan fisik.²⁰

Sedangkan dalam hal distribusi kekuasaan kemampuan setiap pemimpin dalam hal mendistribusikan sangatlah bervariasi. Kemampuan seseorang mungkin karena diciptakan oleh orang lain tetapi mungkin juga yang bersangkutan tidak lagi memiliki semangat untuk mengubah nasib. Selanjutnya adalah penggunaan sumber sumber kekuasaan yang dalam buku Ramlan Surbakti dijelaskan bahwa ada tiga pilihan bagi setiap orang atau kelompok dalam menggunakan sumber kekuasaan. *Pertama*, menggunakan sumber itu ke dalam kegiatan politik, *kedua*

¹⁹ Dadang Juliantoro, *Pembaruan Desa* (Yogyakarta : Loppera Pustaka Utama, 2002), hal 79.

²⁰ *Ibid* hal 65.

menginvestasikan sumber itu ke Bank dan dunia usaha, dan yang *ketiga* menggunakan sumber itu untuk mempengaruhi proses politik baik dalam hal menjagokan calon tertentu sebagai pemimpin politik dan pemerintah maupun dalam hal memperjuangkan kebijakan tertentu yang menguntungkan.

Sedangkan dalam hal hasil penggunaan sumber sumber kekuasaan terdiri dari tiga. *Pertama*, jumlah individu yang dikendalikan, yaitu jumlah anggota masyarakat yang menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat. *Kedua*, bidang-bidang yang dikendalikan yaitu, sektor-sektor kehidupan dan urusan-urusan yang ditangani dan dikendalikan pemegang kekuasaan (pemerintah pusat). *Ketiga*, kedalaman pengaruh kekuasaan yaitu seberapa dalam perilaku individu dipengaruhi pemegang kekuasaan apakah mempengaruhi perilaku luar ataukah sampai mempengaruhi perilaku dalam, seperti persepsi, orientasi, sikap, dan cara berfikir.²¹

2. Konsep Tentang Desa

a. Pengertian Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²²

²¹ Ibid, hal 74.

²² *Kamus Penataan Ruang* (Jakarta : Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum Indonesia, 2009).

b. Karakteristik Sosial Pedesaan

Menurut Redfield dalam Wisadirana masyarakat pedesaan adalah masyarakat tradisional dengan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:²³

1. Relatif bersifat homogen dengan rasa persatuan yang kuat
2. Memiliki sistem sosial yang teratur dengan perilaku tradisionalnya
3. Taat pada ajaran-ajaran agama dan menurut kepada pemuka masyarakat.

c. Karakteristik Ekonomi Pedesaan

Secara ekonomi desa memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Desa memiliki mata pencaharian yang homogen
2. Kehidupan desa lebih menekankan anggota keluarga sebagai unit ekonomi.

Artinya, semua anggota keluarga turut bersama-sama memnuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

d. Unsur-unsur Desa

Menurut Bintarto dalam Daljoeni, dalam pembentukan sebuah desa terdapat tiga unsur pokok yaitu:²⁴

1. Daerah atau wilayah yang merupakan tempat tinggal dan tempat beraktifitas. Daerah dalam arti tanah-tanah pekarangan dan pertanian beserta penggunaannya. Termasuk aspek lokasi, luas, batas, yang kesemuanya merupakan aspek geografis wilayah setempat

²³ Darsono Wisadirana, *Metode penelitian & pedoman penulisan skripsi untuk ilmu social* (Malang : UMM Pres 2005).

²⁴ Daldjoeni, *Geografi Kota dan Desa* (Bandung: Penerbit Alumni, 1998)

2. Penduduk, terkait dengan kualitas dan kuantitasnya. Penduduk disini meliputi jumlah, penambahan, kepadatan, penyebaran serta mata pencariannya
3. Tata kehidupan atau aturan-aturan yang berhubungan langsung dengan keadaan masyarakat dan adat istiadat setempat.

e. Ciri-ciri Desa

Menurut Dirjen Pembangunan Desa Departemen Dalam Negeri, wilayah pedesaan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Perbandingan tanah dengan manusia yang besar;
2. Lapangan kerja agraris;
3. Hubungan penduduk yang akrab; dan
4. Sifat yang menurut tradisi.

f. Pola Pengelompokkan Desa

Menurut Bintarto dalam Daldjoeni, pola desa dibagi menjadi enam pola, yaitu:²⁵

1. Memanjang jalan;
2. Memanjang sungai;
3. Radial;
4. Tersebar;
5. Memanjang pantai; dan
6. Memanjang pantai dan sejajar jalan kereta api.

²⁵ *Ibid*

Desa menurut Sadu pertama kali dikemukakan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, seorang Belanda anggota *Raad van Indie* pada masa penjajah kolonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jendral Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia.²⁶ Dalam sebuah laporan tertanggal 14 Juli 1817 kepada pemerintahnya disebutkan tentang adanya desa di daerah-daerah pesisir utara pulau Jawa, dan dikemudian hari ditemukan juga desa-desa di kepulauan luar pulau Jawa yang kurang lebih sama dengan desa yang ada di pulau Jawa.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian.

Sementara itu Koentjaraningrat memberikan pengertian tentang desa melalui pemilahan pengertian komunitas dalam dua jenis, yaitu komunitas besar (seperti: kota, negara bagian, negara) dan komunitas kecil (seperti: *band*, desa, rukun tetangga dan sebagainya). Dalam hal ini Koentjaraningrat mendefinisikan desa sebagai "*komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat*".²⁷ Koentjaraningrat tidak memberikan penegasan bahwa komunitas desa secara khusus tergantung pada sektor pertanian. Dengan kata lain artinya bahwa masyarakat desa sebagai sebuah komunitas kecil itu dapat saja memiliki ciri-ciri aktivitas ekonomi yang beragam, tidak di sektor pertanian saja.

²⁶ Sutardjo Kartohadikoesoemo, *Desa* (Yogyakarta: S.n., 1967), hal 7

²⁷ Koentjaraningrat (ed.), *Masyarakat Desa di Indonesia* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1977), hal 162

Tabel Perbandingan Karakteristik Desa dan Kota²⁸

No.	Karakteristik Desa	Karakteristik Kota
1	besarnya peranan kelompok primer.	besarnya peranan kelompok sekunder.
2	faktor geografik yang menentukan sebagai dasar pembentukan kelompok/ asosiasi.	anonimitas merupakan ciri kehidupan masyarakatnya
3	hubungan lebih bersifat intim dan awet.	lebih banyak mengubah lingkungan tergantung pada spesialisasi
4	homogen.	heterogen.
5	mobilitas sosial rendah.	mobilitas sosial tinggi.
6	keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi.	hubungan antara orang satu dengan yang lebih di dasarkan atas kepentingan dari pada kedaerahan.
7	populasi anak dalam proporsi yang lebih besar	lebih banyak tersedia lembaga atau fasilitas untuk mendapatkan barang dan pelayanan.

g. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan.²⁹ Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat.

Calon Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai persyaratan:³⁰

- a) Bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa;

²⁸ Roucek dan Warren, *Sociology An Introduction* (New York: Littlefield, 1962). Diterjemahkan oleh Agus Salim, *Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002).

²⁹ UU No 32/2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 204, hal 118

³⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Kepala Desa Pasal 9 Hal 5

- b) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup ;
- c) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/ atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah atau surat tanda tamat belajar dari lembaga yang berwenang ;
- d) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat kenal lahir dari lembaga yang berwenang ; e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup ;
- e) Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat, terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut tidak terputus-putus kecuali penduduk Desa asli yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk ;
- f) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup ;
- g) Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup ;
- h) Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan yang dibuktikan dengan surat pernyataan

bermaterai cukup. (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI/ POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki bukti surat izin dari Instansi Induknya.

h. Tugas, Wewenang, Kewajiban, Larangan Dan Hak Kepala Desa³¹

- 1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a) memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
 - b) mengajukan rancangan peraturan desa ;
 - c) menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
 - d) menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;
 - e) membina kehidupan masyarakat desa ;
 - f) membina perekonomian desa ;
 - g) mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;
 - h) mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; dan

³¹ Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Kepala Desa Pasal 30 Hal 13

- i) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi ;
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa ;
- g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan ;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik ;
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa ;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa ;
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa ;
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa ;
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat ;
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa ;

- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Selain itu mengenai larangan bagi kepala desa telah diatur dalam Pasal 32 yang berbunyi Kepala Desa dilarang ;

1. Menjadi pengurus partai politik ;
2. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan ;
3. Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD ;
4. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
5. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain ;
6. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
7. Menyalahgunakan wewenang ; dan
8. Melanggar sumpah/janji jabatan.